

IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNMENT DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITAS REMAJA PADA AKTIVITAS GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

Dinda Asri Sudioanto¹⁾, Siti Khadijah²⁾, Saidun Hutasuhut³⁾, Hasyim⁴⁾

Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4}

E-mail: ssndad18@gmail.com

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman kerjasama kolaboratif antara Pusat Pengamatan dan Perlindungan Remaja dan sekolah dalam pencegahan kenakalan remaja. Penulis mempelajari hasil dan permasalahan/hambatan dalam implementasi untuk mengembangkan pedoman ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami masalah. Studi ini menemukan bahwa ada berbagai tahapan koordinasi kolaboratif. Tahap pertama melibatkan pengambilan keputusan kolaboratif mengenai perencanaan. Berikutnya adalah partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dan sekolah, dengan pihak sekolah jaringan orang tua/wali dari populasi sasaran remaja. Terdapat manfaat yang melekat bagi semua pihak terkait dalam penerapannya, misalnya dengan mengurangi kenakalan remaja di sekolah dan hingga mengurangi populasi penduduk di Kota Medan. Mitra pelaksana turut serta dalam memperoleh manfaat ini. Tahap terakhir adalah partisipasi dalam evaluasi kegiatan. Informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kegiatan dan menyempurnakan strategi.

Kata Kunci: *Kenakalan Remaja, Pencegahan Kenakalan, Departemen Pengamatan Dan Perlindungan Remaja*

ABSTRACT - *This research aims to produce guidelines for collaborative cooperation between the Juvenile Observation and Protection Center and schools in juvenile delinquency prevention. The authors studied the results and problems/barriers in implementation to develop this guideline. This research used a qualitative approach in understanding the problem. The study found that there are different stages of collaborative coordination. The first stage involves collaborative decision-making on planning. Next is participation in the implementation of activities, requiring collaboration between the Medan City Government and schools, with the schools networking parents/guardians of the target population of adolescents. There are inherent benefits for all parties involved in the implementation, for example by reducing juvenile delinquency in schools and thus reducing the population in Medan City. Implementing partners participate in obtaining these benefits. The final stage is participation in the evaluation of the activities. The information is used to improve activities and refine strategies.*

Keywords: *Juvenile Delinquency, Delinquency Prevention, Department of Juvenile Observation and Protection*

PENDAHULUAN

Kota Medan adalah salah satu kota besar di Provinsi Sumatera Utara, dan termasuk sebagai kategori kota maju. Di setiap kota-kota besar atau maju pasti memiliki peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kriminalitas juga ikut meningkat. Akhir-akhir ini banyak anak-anak remaja, baik di tingkat sekolah menengah pertama maupun menengah ke atas melakukan keonaran dengan menggunakan sepeda motor dan kerap membawa senjata tajam atau yang biasa kita sebut sebagai geng motor. Hal ini ditengarai oleh akibat dari terjadinya perceraian, menurunnya keharmonisan keluarga, kurangnya pelatihan bagi orang tua/wali mengenai pengasuhan anak yang baik, kemiskinan, beberapa masyarakat mengalami dampak akibat percepatan migrasi, dan teknologi informasi modern mempunyai beragam dampak terhadap anak-anak/remaja saat ini dengan cara yang sulit diprediksi. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan perilaku agresif pada sebagian remaja. Dalam beberapa kasus, agresi ini mengarah pada perilaku kekerasan atau kriminal yang dapat mengakibatkan penahanan pada remaja (Patcharee Bunkham, 2016).

Oleh karena itu, pola peningkatan agresi di kalangan remaja ini dapat mengarah pada siklus kekerasan dan kejahatan yang menjadi gaya hidup yang mendarah daging bagi sebagian orang. Ini bukan hanya soal pemberontakan remaja terhadap norma-norma budaya kesopanan; bahkan, perilaku tersebut dapat memburuk menjadi kejahatan terhadap negara. Ada peningkatan laporan mengenai perilaku pemberontakan remaja di Kota Medan, seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar geng atau siswa, pelanggaran hak seksual, pemerkosaan, atau tindakan buruk seperti pembunuhan. Saat ini, masyarakat Kota Medan lebih memilih untuk menangani permasalahan tersebut dengan mengembalikan remaja yang bermasalah ke pihak yang berwajib untuk dilakukannya penanganan dan pembekalan.

Kenakalan remaja harus menjadi perhatian semua sektor dan organisasi terkait, dan tindakan segera sangat diperlukan. Salah satu inisiatif baru adalah kolaboratif antara lembaga pendidikan, Pemerintah Kota Medan, pihak sekolah serta orang tua/wali. Kolaborasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi remaja yang berisiko atau bermasalah sehingga tindakan perbaikan dapat diambil sebelum remaja tersebut terjerumus ke dalam

perilaku kriminal (Wirayuth Sukcharoen, 2015). Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pencegahan kenakalan akan lebih efisien jika ada koordinasi kolaboratif antara Pemerintah Kota Medan, keluarga, sekolah dan masyarakat setempat. Melalui intervensi yang cermat pada tahap awal, pedoman dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sejak awal sebelum menjadi ancaman yang lebih besar (Jutharat Uaamnoey, 2008). Program yang menjadi fokus penelitian ini mendorong sekolah untuk terlibat aktif dalam strategi pencegahan dengan cara yang disesuaikan dengan budaya dan masyarakat di Kota Medan. Sekolah dasar dan menengah adalah tempat yang baik untuk memulai karena mereka adalah penjaga gerbang generasi muda (Mohideen, dkk, 2016). Sekolah-sekolah ini membantu membentuk pengetahuan, pemikiran, sikap, dan perilaku generasi muda sehingga dapat mengambil keputusan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya. Pada saat yang sama, sekolah harus memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Anak-anak harus dibuat merasa bahwa mereka memang demikian dilindungi dan dihargai karena hal itu akan memberi mereka kepercayaan diri untuk berperilaku sopan dan menjauhi perilaku yang tidak baik. Jika pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat bekerja sama untuk menerapkan pedoman kolaborasi ini, maka pencegahan kenakalan remaja dapat dicapai dengan lebih efisien.

Kolaborasi ini memperkenalkan strategi di kota Medan melalui kolaborasi Pemerintah Kota Medan, sekolah, orangtua/wali serta masyarakat dan lembaga terkait sebagai proses peradilan alternatif terhadap kenakalan remaja dan sebagai mekanisme pencegahan kenakalan remaja. Kajian ini merupakan kajian terhadap pedoman koordinasi kolaboratif antara Pemerintah Kota Medan, sekolah, orangtua/wali serta masyarakat dan lembaga terkait dalam pencegahan kenakalan remaja, serta penilaian terhadap hasil implementasi selama ini. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyempurnakan pedoman koordinasi kolaboratif antara pemerintah dan lembaga terkait untuk implementasi intervensi pencegahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pedoman ini dapat membantu menginformasikan pengembangan kebijakan Pemerintah dalam proses kolaborasi antar lembaga yang menangani isu-isu terkait kenakalan remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Data dikumpulkan dengan wawancara antar pribadi berstruktur secara mendalam dan observasi bukan partisipasi (*non participant observation*) kepada salah satu pihak sekolah dan siswa. Metode ini digunakan karena untuk mengetahui secara mendalam mengapa siswa terlibat dalam aktivitas ini. Sample akan dipilih dengan metode “*snowball sampling*”. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi kepustakaan, dengan pengumpulan literatur, sumber bacaan dari artikel ilmiah, buku dan juga dari berbagai media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Kolaboratif Dalam Pencegahan Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor Di Kota Medan

Studi ini menemukan bahwa sekolah-sekolah yang berpartisipasi dan Pemerintah Kota Medan berkolaborasi dalam setiap langkah proses implementasi. Kolaborasi ini ditandai dengan 'partisipasi penuh' sebagaimana dikonsepsi oleh Cohen & Uphoff (1977).

Tabel 1 menguraikan kegiatan proyek berdasarkan empat jenis partisipasi.

No	Langkah-Langkah Di Proses Partisipasi	Pedoman Koordinasi Kolaboratif
1	Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Pada langkah pertama ini, staf yang berpartisipasi dan pemangku kepentingan bekerja sama untuk menentukan pedoman dan kegiatan pencegahan kenakalan remaja, dengan fokus awal di sekolah. Administrator sekolah, guru dan perwakilan Pemerintah Kota Medan berbagi ide dan merencanakan implementasi bersama, dengan penekanan pada penyesuaian kegiatan dengan konteks sosial budaya setempat. Mereka juga meninjau status kenakalan remaja di sekolah saat ini.

2	Partisipasi dalam kolaboratif penerapan	<p>Langkah kedua mencakup implementasi bersama kegiatan proyek. Kegiatan-kegiatan ini berbeda dari satu situs ke situs lainnya. Jaringan sosial lokal ikut serta dalam implementasi pada tahap ini. Penelitian ini menemukan bahwa pedoman dalam pencegahan kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi pencegahan dan pengendalian, sebagai berikut: 1) Mendidik siswa di sekolah Isinya mencakup undang-undang yang relevan dan sistem peradilan pidana, pemahaman tentang berbagai jenis kejahatan dan perilaku nakal, hukuman yang khas untuk berbagai jenis tindak pidana, dll. Tujuannya tidak hanya untuk mendidik siswa tentang kenakalan remaja tetapi juga untuk mendorong mereka untuk berbagi informasi ini dengan rekan-rekan mereka. 2) Mendorong peran serta orang tua/wali dan guru dalam pencegahan kenakalan remaja Selain mendidik generasi muda, orang tua juga merupakan target populasi yang penting dari proyek ini karena mereka dapat memperkuat pendidikan pencegahan dan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Orang dewasa dilatih mengenai teknik mengasuh anak, terutama selama masa remaja yang dapat menjadi masa penuh gejolak seiring dengan bertambahnya usia remaja. Orang tua disarankan mengenai berbagai jenis kegiatan keluarga yang dapat meningkatkan hubungan antargenerasi dalam rumah tangga. Sasaran ketiga dari proyek ini adalah para guru di sekolah-sekolah yang berpartisipasi karena sikap guru terhadap remaja dapat sangat berpengaruh terhadap bagaimana remaja tersebut memilih untuk berperilaku. Semua siswa perlu merasa dihargai, dan guru harus menghindari pilih kasih dan harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan watak negatif terhadap remaja yang menunjukkan kecenderungan kenakalan remaja. 3) Membangun hubungan antar sekolah, Pemerintah Kota Medan dan instansi terkait di wilayah tersebut. Komponen ini penting untuk</p>
---	---	--

		<p>menyelaraskan berbagai pelaksana agar sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Para pelaku ini merupakan kelompok yang beragam, dengan perwakilan dari sekolah, JOPC, masyarakat, dan pejabat daerah yang berasal dari latar belakang berbeda. Mereka perlu berbagi visi yang sama mengenai tujuan proyek, kegiatan dan hasil yang diinginkan sebagai prasyarat untuk kolaborasi yang efektif. 4) Belajar dari pengalaman Komponen ini melibatkan mantan warga Pemerintah Kota Medan untuk memberikan presentasi tentang pengalamannya kepada kelompok siswa di sekolah peserta. Kegiatan ini dapat memberikan dampak yang nyata karena bukan lagi sekedar teori melainkan kesaksian nyata tentang penyebab dan akibat dari kenakalan remaja. 5) Membangun jaringan peserta didik untuk mempertahankan intervensi proyek, penting untuk merekrut, melatih dan menghubungkan siswa yang berpikiran sukarela untuk menjadi pemimpin sejawat yang dapat berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan respons terhadap kenakalan remaja dengan sesama siswa. Mereka dapat membantu remaja memahami apa yang dimaksud dengan perilaku berisiko dan memantau siswa yang mungkin rentan terhadap kenakalan remaja. 6) Kunjungan belajar Di luar kelas, penting bagi anak-anak dan remaja untuk mengunjungi komunitas sebenarnya untuk memahami lingkungan kontekstual yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Hal ini dapat berupa kunjungan belajar ke rumah, kelompok berisiko atau kelompok pelajar lainnya.</p>
3	Partisipasi dalam memperoleh manfaat	<p>Pada tahap ini, pelaksana dan pemangku kepentingan berbagi manfaat dari proyek dalam hal pengurangan kenakalan remaja, munculnya pusat mediasi/konseling bagi siswa bermasalah, dan jaringan sosial yang menjadi lebih aktif dalam pencegahan dan pengendalian kenakalan remaja. Jaringan dapat berbentuk virtual</p>

		<p>atau online untuk mempercepat pembagian informasi. Jaringan pertukaran ini dapat memberikan informasi terkini mengenai sistem peradilan pidana anak, melakukan pemantauan terhadap situasi risiko dan remaja yang rentan, dan berbagi petunjuk. Jenis jaringan online ini telah dipelajari oleh Eid dan Ward (2009) yang menemukan bahwa jaringan ini memungkinkan komunikasi multi arah di antara kelompok sebaya dan secara signifikan meningkatkan frekuensi dan cakupan berbagi informasi serta konseling dan pembinaan sejawat. Selain itu, implementasi proyek dapat membantu menghasilkan database berisi profil siswa yang dapat diakses oleh guru untuk lebih memahami sejarah dan konteks setiap individu di kelas mereka secara tepat waktu. Basis data perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi informasi. Informasi ini dapat diterapkan dalam pencegahan dan pengendalian kenakalan remaja di lingkungan sekolah</p>
4	Partisipasi dalam evaluasi	<p>Langkah terakhir dalam kolaborasi adalah partisipasi penuh dalam evaluasi masukan, proses, keluaran dan hasil pelaksanaan proyek. Evaluasi menciptakan peluang untuk mendengarkan pemikiran dan pandangan pelaksana proyek, peserta dan pemangku kepentingan. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan dalam bentuk sesi kelompok kecil atau wawancara dengan informan kunci. Evaluasi harus menjadi proses yang berkelanjutan sehingga temuan dapat diterapkan pada implementasi yang sedang berjalan untuk meningkatkan hasil.</p>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pencegahan dan pengendalian kenakalan remaja telah diterapkan melalui proses sosialisasi yang lebih baik. Sekolah dipandang sebagai “rumah kedua” bagi generasi muda di ruang kelas dan merupakan pusat pendidikan, pembentukan sikap dan pengembangan keterampilan untuk mencegah

kenakalan remaja. Proyek ini menggunakan metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Siswa belajar tentang undang-undang dan hukuman yang terkait dengan kenakalan remaja, dan mereka mendengar kesaksian dari teman-teman yang lebih tua yang pernah menghabiskan waktu di Pemerintah Kota Medan karena pelanggaran pidana. Informasi ini dilengkapi dengan berbagai media yang dapat diulas siswa di waktu senggangnya. Pelaksana proyek memahami bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, dan proses sosialisasinya dilakukan secara bertahap.

Pendekatan ini konsisten dengan konsep Mazerolle dan Rombouts (2005) yang dirujuk dalam Penchan Sherer dkk (2011). Artinya, pendekatan pencegahan kenakalan remaja melalui sekolah harus menjadi awal yang efektif, diikuti dengan memperkuat intervensi di luar kelas untuk “menyuntik” remaja, menekan kenakalan, dan memberikan rehabilitasi bagi pelaku melalui koordinasi kolaboratif antar lembaga terkait. Efektivitas koordinasi antara lembaga pemasyarakatan seperti Pemerintah Kota Medan dan sekolah sejalan dengan penelitian Korakod Narkvichetr dkk (2012) yang menemukan bahwa pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja harus merupakan kolaborasi antara instansi pemerintah terkait dan masyarakat untuk menjaga kenakalan remaja. Kepedulian terhadap anak/remaja yang rentan terhadap kenakalan remaja. Selain itu, penelitian Nataya Janreun (2013) juga memperkuat strategi yang digunakan dalam proyek ini. Studi tersebut menemukan bahwa penciptaan jaringan sosial dan implementasi kolaboratif antara JOPC, keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pendekatan yang efektif untuk mengembangkan pedoman rehabilitasi remaja yang telah dihukum karena pelanggaran remaja, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif.

Pedoman yang digunakan dalam proyek ini juga konsisten dengan Teori Ikatan Sosial Hirschi (1969). Pendaftaran pada suatu lembaga pendidikan merupakan faktor kunci dalam membentuk perilaku individu seiring dengan bertambahnya usia siswa memasuki masa remaja dan dewasa. Sebaliknya kenakalan remaja sering dikaitkan dengan putus sekolah atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Partisipasi dalam kegiatan terorganisir di sekolah merupakan cara untuk memperkuat hubungan antara siswa dan sekolah, dan lebih lanjut memperkuat efek “inokulasi” sekolah formal terhadap

pengecahan kenakalan remaja.

B. Hasil Koordinasi Kolaboratif Dalam Pencegahan Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor Di Kota Medan

1. Berkurangnya kenakalan remaja khususnya geng motor

Kenakalan remaja menurun di antara populasi yang berpartisipasi dalam proyek ini. Jumlah pelanggaran siswa yang tercatat di sekolah-sekolah yang berpartisipasi menurun, dan beberapa sekolah melaporkan bahwa tidak ada siswanya yang dikembalikan ke JOPC. Perilaku siswa yang mengganggu juga menurun; dan tidak ada siswa yang mengikuti kegiatan proyek yang melanggar peraturan sekolah.

2. Pembentukan jejaring sosial online untuk membantu observasi remaja dan perilaku nakal di sekolah

Jaringan online tersebut merupakan hasil kolaborasi siswa sendiri dalam menciptakan jaringan berbasis teman sebaya untuk pengawasan dan pencegahan kenakalan remaja. Jaringan tersebut menciptakan saluran tambahan untuk komunikasi multi-arah, dan memungkinkan pelaporan pelanggaran secara real-time saat terjadi. Dengan cara ini, konseling dapat diakses segera setelah terjadi masalah atau gangguan

3. Pembentukan jejaring sosial lokal untuk pencegahan remaja kejahatan

Koordinasi kolaboratif antara sekolah dan PEMKOT MEDAN berkontribusi pada terbentuknya jaringan sosial di masyarakat sekitar. Beberapa dari jaringan ini terintegrasi dengan instansi pemerintah daerah, misalnya dalam melaksanakan kegiatan proyek atau upaya kolaboratif lainnya untuk memerangi masalah kenakalan remaja. Jaringan berbasis komunitas ini juga merupakan mekanisme untuk mengawasi individu-individu rentan dan kelompok berisiko yang rentan terhadap perilaku nakal atau mengganggu. Jaringan ini memperkuat intervensi proyek formal dan membantu menyebarkan pengetahuan dan sikap untuk membantu upaya pencegahan. Jaringan ini juga membantu mendidik masyarakat mengenai peran dan fungsi Pemkot Medan, Departemen Pengawasan dan Perlindungan Remaja, dan Kementerian Kehakiman. Jaringan-jaringan yang dipimpin oleh komunitas ini kemungkinan besar akan bertahan karena mereka digerakkan dari tingkat akar rumput. Kolaborasi ini membantu menyediakan hubungan masyarakat yang

baik mengenai proyek dan meningkatkan profil proyek di antara lembaga pemerintah dan kelompok swasta lainnya.

4. Pembuatan database kenakalan remaja di sekolah

Kegiatan proyek memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data siswa di semua sekolah yang berpartisipasi. Basis data ini memungkinkan guru untuk meninjau riwayat dan status setiap siswa secara real time karena informasi dalam sistem diperbarui secara terus menerus. Hal ini dapat membantu guru untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko melakukan kenakalan sebelum hal itu terjadi. Daftar pemeriksaan online juga dapat membantu menilai perilaku dan keadaan emosi remaja.

5. Peningkatan kapasitas pelaksana

Hanya dengan berpartisipasi dalam proyek ini, perencanaan, implementasi dan evaluasi kolaboratif telah membantu membangun kapasitas staf yang berpartisipasi dan pelaksana lainnya. Staf memperoleh peningkatan kepercayaan diri untuk mengekspresikan pendapat mereka dan bekerja secara konstruktif dalam tim. Peningkatan kapasitas mencerminkan dengan baik lembaga asal dan peningkatan semangat kerja. Peserta memperoleh peningkatan kesadaran mengenai masalah kenakalan remaja dan belajar bagaimana merancang langkah-langkah dan rencana untuk implementasi yang efektif.

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum dan proses dalam sistem peradilan Siswa yang berpartisipasi dalam proyek ini memperoleh pengetahuan tentang pedoman dan standar perilaku agar mereka terhindar dari masalah hukum.

Mereka belajar tentang proses penuntutan pidana dan pengalaman dikembalikan ke JOPC. Pengetahuan ini dapat berfungsi sebagai pencegah kenakalan remaja, memperkuat keterampilan pencegahan, dan menjadi dasar untuk menasihati teman sebaya bagaimana menyelesaikan masalah atau menghindari masalah.

7. Perubahan perilaku anak/remaja di sekolah

Siswa yang diidentifikasi oleh proyek sebagai siswa yang memiliki perilaku berisiko dipantau dan dibimbing dengan lebih hati-hati dibandingkan siswa lainnya oleh guru, konselor, dan staf JOPC. Dengan demikian, hal ini mungkin membantu mencegah kenakalan remaja sebelum terjadi atau menjadi perilaku yang mendarah daging. Sebagai

hasil dari intervensi berbasis proyek, siswa belajar bagaimana meredakan konflik dengan teman-temannya sebelum terjadi perkelahian. Mereka belajar bagaimana berbicara dan bertindak sopan kepada masing-masing orang lain dan mempraktikkan pengendalian diri dan disiplin emosional untuk menghindari perilaku agresif atau antagonis. Berdasarkan temuan penelitian ini, dampak kolektif dari koordinasi kolaboratif antara pemerintah, sekolah dan masyarakat setempat menghasilkan manfaat positif dalam pencegahan kenakalan remaja. Hal ini tercermin dari berkurangnya kejadian kenakalan remaja dan berkurangnya jumlah remaja sekolah yang diserahkan ke JOPC. Proyek ini dapat dianggap telah memberikan dampak sosial yang signifikan di provinsi-provinsi yang berpartisipasi.

C. Hambatan Realisasi Kerjasama Kolaboratif

1. Beberapa guru di sekolah yang berpartisipasi masih mempunyai pandangan negatif sikap terhadap siswa yang menunjukkan perilaku yang tidak pantas. Jika guru mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan cara yang jelas, beberapa siswa mungkin akan kehilangan harga diri atau memberontak dengan bergabung dengan kelompok remaja yang memiliki kecenderungan nakal.
2. Beberapa personel sekolah binaan takut untuk bergabung proyek dapat mencoreng citra atau reputasi sekolah. Oleh karena itu, beberapa staf berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki siswa bermasalah atau menolak melaksanakan kegiatan proyek. Secara khusus, para personel ini menentang gagasan untuk meminta mantan penghuni Pemerintah Kota Medan datang ke sekolah untuk memberikan presentasi kepada siswa. Mereka berpendapat bahwa presentasi ini akan memakan waktu jauh dari pengajaran di kelas reguler.
3. Beberapa orang merasa bahwa berpartisipasi dalam proyek ini menciptakan beban kerja yang lebih besar bagi staf pelaksana. Misalnya, ada perdebatan bahwa staf Pemerintah Kota Medan sudah memiliki beban kerja yang berat, dan partisipasi dalam proyek akan menciptakan ketidakseimbangan antara staf yang bekerja di Pemerintah Kota Medan (pengendalian dan pengawasan pemuda warga) dan mereka yang bekerja di lapangan (mencegah kenakalan). Oleh karena itu, tidak

semua staf yang dapat mengikuti proyek melakukan hal tersebut, atau beberapa menolak untuk pergi ke sekolah yang berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan proyek sesuai jadwal.

4. Beberapa kegiatan proyek tumpang tindih atau diduplikasi kegiatan rutin JOPC, dan hal ini mengganggu proses kolaborasi di beberapa lokasi.
5. Durasi pelaksanaan proyek terlalu terbatas. Tidak selalu mungkin untuk menjadwalkan kegiatan dengan cara yang tidak bertentangan dengan acara sekolah yang dijadwalkan secara rutin. Oleh karena itu, terdapat kurangnya kesinambungan kegiatan proyek di beberapa lokasi karena kegiatan harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kewajiban siswa dan guru. Untuk mencapai cakupan penuh terhadap siswa yang rentan melalui serangkaian kegiatan yang lengkap, diperlukan perpanjangan durasi pelaksanaan proyek.
6. Menemukan waktu untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan merupakan sebuah tantangan pelaksana yang nyaman bagi semua personel atau orang tua/wali yang berpartisipasi. Pada beberapa periode waktu, pelaksanaan proyek bertepatan dengan panen tahunan, dan hal ini menghalangi banyak orang tua petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Oleh karena itu, beberapa kegiatan harus dijadwalkan ulang di kemudian hari untuk mengakomodasi konflik tersebut. Selain itu, banyak siswa yang tidak tinggal serumah dengan orang tuanya karena orang tuanya harus pergi ke provinsi lain untuk bekerja. Jadi, mungkin jumlahnya lebih sedikit pengawasan dan kehangatan dalam rumah tangga yang, secara teori, dapat berkontribusi terhadap kenakalan atau mengurangi peluang untuk mencegahnya. Oleh karena itu, hal ini menjadikan penguatan siswa secara langsung untuk saling membantu dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian guru dalam mengidentifikasi dan memperhatikan siswa yang lebih rentan menjadi lebih penting.
7. Hampir menurut definisi, para siswa yang rentan terhadap kenakalan (yaitu, menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau mengganggu) tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan proyek. Bahkan, jika mereka mengetahui ada kegiatan

proyek di sekolah pada hari tertentu, mereka akan membolos.

Selain kolaborasi sentral antara sekolah dan Pemerintah Kota Medan, proyek ini perlu menciptakan hubungan dengan jaringan entitas sektor publik dan swasta serta masyarakat tuan rumah untuk membantu berpartisipasi dalam pencegahan dan pemantauan kenakalan remaja. Jaringan tersebut mungkin mencakup kepala desa, staf organisasi administrasi lokal, polisi, tokoh masyarakat, dan lainnya, dan partisipasi mereka akan membantu meningkatkan efisiensi kegiatan proyek, khususnya di luar kelas. Partisipasi aparat penegak hukum sangat penting mengingat pengalaman mereka dalam menangani perilaku kriminal dan pengawasan terhadap area berisiko di lingkungan sekolah. Semakin banyak peserta yang terlibat dalam mendukung kegiatan proyek, semakin besar kemungkinan berkembang dan menyebarnya suatu norma sosial yang mencegah segala bentuk kenakalan remaja, dan membantu memberantasnya. Pedoman ini konsisten dengan temuan Jutharat Uaamnoey bahwa partisipasi dalam pencegahan kejahatan melalui kolaborasi dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang setara dengan pemerintah kemungkinan akan menjadi pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kualitas hidup.

Departemen Pengawasan dan Perlindungan Remaja perlu mengintensifkan dukungannya terhadap personel Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan pedoman dalam melakukan kegiatan pencegahan kenakalan remaja. Harus ada program terkait peningkatan kapasitas bagi guru dan personel lain yang tugasnya membantu anak-anak dan remaja yang rentan. Harus ada pelatihan perubahan perilaku remaja bagi guru dan orang tua/wali yang mengasuh remaja. Pemerintah Kota Medan juga harus berperan sebagai mentor dan penasihat bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam proyek seperti yang dijelaskan di sini, untuk mempertahankan motivasi para guru dan membantu para guru merasakan pencapaian.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pedoman proyek diterapkan dalam empat langkah proses kolaboratif: perencanaan, implementasi, perolehan manfaat, dan pemantauan dan evaluasi. Terdapat pengurangan kenakalan remaja di sekolah dan

terdapat penciptaan dan perluasan jaringan kerja sama untuk pencegahan kenakalan remaja yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah rekomendasi yang lebih spesifik berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Sebelum meluncurkan proyek seperti ini, Departemen Observasi dan Perlindungan Remaja harus melakukan orientasi terhadap sekolah-sekolah yang berpartisipasi sehingga administrator dan guru menyadari pentingnya dan potensi manfaat proyek dan perlunya kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Medan dan lembaga-lembaga pendidikan.
2. Harus ada kolaborasi yang sistematis antara keduanya pelaksana, termasuk perencanaan bersama (jangka pendek dan jangka panjang), penyusunan jadwal pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Intervensi harus dijadwalkan untuk mencapai cakupan maksimal terhadap kaum muda yang rentan, dan meminimalkan tumpang tindih/duplikasi dengan pekerjaan rutin JOPC.
3. Para pelaksana perlu memperhatikan indikator-indikator P&E sejak awal pelaksanaan dan sepanjang durasi proyek. Setiap kegiatan harus konsisten dengan tujuan proyek. Pemantauan pelaksanaan yang berkelanjutan harus mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, dan perubahan harus dilakukan selama pelaksanaan jika hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Harus ada penilaian internal dan eksternal sebelum, selama dan setelah pelaksanaan proyek.
4. Pedoman tersebut harus disebarluaskan ke setiap kabupaten/kota di wilayah tersebut provinsi untuk memperluas pencegahan kenakalan remaja. Juga harus ada penciptaan dan perluasan jaringan pemimpin sejawat siswa, dimulai dengan pendidik sejawat di lokasi percontohan yang kemudian membantu melatih rekan-rekan mereka di sekolah lain hingga setiap sekolah tercakup dalam program ini.
5. Harus ada dokumentasi proyek yang konkrit pelaksanaannya sebagai acuan untuk ditiru oleh sekolah lain yang ingin menerapkan pedoman tersebut.
6. Sekolah hendaknya mengembangkan modul pembelajaran tentang pencegahan kenakalan remaja pada siswa yang diintegrasikan ke dalam kurikulum rutin.
7. Perlu adanya penguatan implementasi melalui kolaborasi Pemkot Medan, sekolah

dan organisasi terkait di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aoki, Yu. (2010). Does schooling reduce juvenile delinquency? Evidence from a natural experiment in Japan. Buch/Ammerse, Germany, 13th IZA European Summer School in Labor Economics.
- Cohen, J. M., and Uphoff N. T. (1977). Rural development participation: Concept and measures for project design. New York : Prentice-Hall.
- Eid, M. & Ward, S. J. A. (2009). Editorial: Ethics, new media, and social networks. *Global Media Journal --Canadian Edition*, 2(1), 1-4.
- Hirschi, Travis. (1969). *Causer of delinquency*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Irmayani, N. R. (2018). Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor. *Sosio Informa*, 4(2).
- Jutharat Uaamnoey. (2008). *Criminal Sociology*. Bangkok: Chulalongkorn University.
- Karton, Kartini o. (2011). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Korakod Narkvichetr et al. (2012). Study of a model of rehabilitation of criminal offenders through community participation. Bangkok: Department of Probation.
- Mohideen, R.S., et.al. (2016). Social factors that contribute juvenile delinquency at Malaka. *Journal of Education and Social Sciences*, 3, 93 – 98.
- Nataya Janreun. (2013). Prevention and response to juvenile delinquency of the Youth and Family Court in Uthai Thani Province. Department of Public Administration. Pitsanuloke University.
- Pacharee Bunkham. (2016). Violence of aggressive behavior. Access by June 26, 2017. <http://www.thaihealth.or.th/Content/34085-ความรุนแรงของพฤติกรรมก้าวร้าว.html>.
- Penchan Sherer et al (2011). Study of a model of social management to combat the problem of violence in children and youth. Bangkok: Charoendee Mankong Printing House.
- Rahmat, D. (2013). “Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Unifikasi* Volume 1 No.1, 45-78.

Sambas, N. (2011). “Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung”. *Jurnal Mimbar* Volume XXVII, No. 2, 225-232.

Sunee Kalyajit. (2013). Integration of participation of the family, school and the community with prevention of juvenile delinquency. *Integrated Sociology*, pp. 181-199.

Suratmi, E. (2012). Geng Motor. <https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/> Retrieved 23 April 2018.

Wirayuth Sukcharoen. (2015). Policy for Fiscal Year 2015 of the Department of Juvenile Observation and Protection. Nonthaburi: Department of Juvenile Observation and Protectio.

